

## DINAMIKA EKOWISATA *TRI NING TRI* DI BALI PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TIGA TIPE EKOWISATA BALI

*I Nyoman Sukma Arida*

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali.

Email: sukma.arida@gmail.com

*M. Baiquni*

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

*Janianton Damanik*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

*Heddy Shri Ahimsa-Putra*

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

### ABSTRACT

This study is aimed at explain the dynamic process in the development of ecotourism in Bali. Its objectives are 1) to identify and analyze typologies of ecotourism in Bali, 2) to analyze each type of ecotourism, focusing on the aspects of ecotourism products, local community involvement, and its development strategy, and 3) to analyze and formulate appropriate model of ecotourism development in Bali. This is a descriptive qualitative research with relevant data acquisition techniques, namely (a) in-depth interview, (b) field observation, (c) Focus Group Discussion(FGD), and (d) document studies. The four methods were used to capture the needs of data in the field, in accordance with scope of the problem investigated and research objectives. This study found that ecotourism typology in Bali, in terms of its main moving actors (agent of change), is divided into three, namely: (1) investor-driven ecotourism (investor type), (2) community-driven ecotourism (community type), and (3) government-driven ecotourism (government type). This three-type ecotourism in Bali is also known as *tri ning tri*. In practice, each type of ecotourism has different level of conformity with ecotourism principles (TIES, 2000), so that they can be categorized into three groups, which are major (*utama*), intermediate (*madya*) and contemptible (*nista*). Some particular Balinese life stances such as *rwa bhineda* (dualism), *paduwen sareng* (common ownership), dan *nempahang rage* (self devotion) enable the different types of ecotourism to live and develop side by side harmonically in Bali, without negating each other. Through observation in the micro level, this study found that the characteristic of each type tends to shift into hybrid type due to, among others, close interaction with different kinds of stake holders. This also means that the type of ecotourism developed in a village, for example, will most likely to be modified or improvised in such a way to accommodate the available resource potency and characteristic of stakeholders involved on its development or management. The ability to manage all forms of ecotourism, which mainly come from outside of Bali, is then combined by Balinese with their life stance of *rwa bhineda*. Therefore, any ecotourism type or model that comes into, enters and develops in Bali, eventually transforms into a new type of ecotourism.

**Keywords:** *Ecotourism, Tri ning tri, Typologies, Community involvement.*

## DINAMIKA EKOWISATA TRI NING TRI DI BALI PROBLEMATIKA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TIGA TIPE EKOWISATA BALI

*I Nyoman Sukma Arida*

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Bali.

Email: sukma.arida@gmail.com

*M. Baiquni*

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada

*Janianton Damanik*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

*Heddy Shri Ahimsa-Putra*

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada

### ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan proses dinamika yang terjadi dalam pengembangan ekowisata di Bali. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) mengetahui dan menganalisis tipe-tipe ekowisata yang berkembang di Bali, 2) menganalisis perkembangan ekowisata pada masing-masing tipe, khususnya dalam aspek produk ekowisata, pelibatan masyarakat lokal, dan strategi pengembangan, dan 3) menganalisis dan merumuskan model pengembangan ekowisata di Bali. Penelitian ini bercorak penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang memiliki relevansi dengan pendekatan dan kerangka teori tersebut, ada empat cara, yaitu: (a) wawancara mendalam (*indepth interview*), (b) Pengamatan (observasi lapangan), (c) diskusi terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*), dan (d) studi dokument. Penelitian ini menggunakan keempat metode ini untuk menggali kebutuhan data di lapangan, sesuai dengan lingkup masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa tipologi ekowisata Bali dilihat dari sisi aktor utama yang menggerakkan (*agent of change*) dapat dipilah menjadi tiga, yaitu: (1) ekowisata yang digerakkan oleh investor (tipe Investor), (2) ekowisata yang digerakkan oleh masyarakat (tipe Partisipatif), dan (3) ekowisata yang digerakkan oleh pemerintah (tipe pemerintah). Ekowisata Bali yang cenderung berpola tiga ini disebut sebagai *tri ning tri*. Dalam praktiknya masing-masing tipe memiliki tingkat kesuaian yang berbeda-beda dengan prinsip-prinsip ekowisata (TIES, 2000), sehingga bisa dikelompokkan ke dalam ekowisata *utama*, *madya*, dan *nista*. Beberapa sikap hidup masyarakat Bali seperti *rwa bhineda*, *paduwen sareng*, dan *nempahang rage* membuat masing-masing tipe ekowisata bisa berkembang berdampingan secara harmonis di Bali, tanpa meniadakan satu sama lain. Dari pengamatan pada level mikro ditemukan bahwa karakteristik masing-masing tipe cenderung bergeser ke arah tipe hibrid, akibat dari proses interaksinya dengan beragam stakeholder. Artinya, ekowisata yang masuk ke suatu desa akan diimprovisasikan sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia dan keunikan stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan ekowisata. Kemampuan mengolah segala bentuk ekowisata yang datang dari luar tersebut berpadu dengan sikap hidup *rwa bhineda* sehingga menyebabkan kepariwisataan yang

datang, masuk, kemudian berkembang di Bali ditransformasikan menjadi sebuah bentuk baru.

**Kata Kunci:** *Ekowisata, Tri ning tri, Tipologi, Pelibatan masyarakat.*

## PENGANTAR

Berbagai fenomena pembangunan kepariwisataan yang terjadi akibat perkembangan pariwisata Bali selama ini lebih cenderung mengarah kepada menguatnya bentuk pariwisata massal (*mass tourism*). Tidak hanya jumlah wisatawan, juga penyediaan infrastruktur pariwisata, perilaku wisatawan, serta aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan di Bali semakin merepresentasi sosok pariwisata massal (Picard, 2006). Faktor kebijakan pemerintah di dalam menempatkan Bali sebagai destinasi pariwisata andalan memainkan peran penting dalam hal ini. Pemerintah sebagai lokomotif penggerak pembangunan kepariwisataan selalu menargetkan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak-banyaknya sebagai cerminan kesuksesan pembangunan pariwisata. Fasilitas akomodasi, baik kategori hotel berbintang dan non-bintang maupun resort-resort mewah yang dimiliki pemodal asing terus dibangun tanpa memperhatikan daya dukung di Bali.

Hal ini tercermin dari makin meningkatnya nilai investasi di sektor pariwisata di Bali. Badan Penanaman Modal Provinsi (BPMP) Provinsi Bali mencatat bahwa dari Rp 7 triliun investasi pada tahun 2010, sebanyak 80 persen di antaranya masuk untuk sektor pariwisata. Data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2009 tercatat jumlah kamar hotel bintang sebanyak 18.684 unit ditambah dengan 21.775 unit kamar hotel non-bintang (BPS, 2011). Sementara jumlah kamar hotel di Bali, baik berbintang maupun non-bintang, pada tahun 2010 sudah mencapai 45.557 kamar. Jika diasumsikan rerata luas lahan yang digunakan untuk 1 unit kamar adalah 25 m<sup>2</sup>, maka total luas lahan yang diokupasi kamar hotel mencapai 113,89 hektar (Atmaja, Y., I.B., 2002).

Masifnya pertumbuhan investasi pariwisata tersebut pada tataran realitas terlihat

dalam perubahan bentang lahan pulau Bali secara drastis. Daerah pesisir, daerah bantaran sungai, perbukitan, dan pegunungan; bahkan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air pun tidak lepas dari sasaran lokasi pembangunan fasilitas pariwisata. Perubahan fungsi-fungsi lahan yang sangat pesat, bukan saja menjadi ancaman serius terhadap eksistensi para petani yang sejak lama bergantung pada lahan pertanian sawah, tetapi juga mengakibatkan perubahan struktur pekerjaan yang rentan menciptakan masalah pengangguran (Sutawan, 1997).

Pada konteks pengembangan destinasi pariwisata, berbagai kondisi di atas sangat potensial mengubah wajah Bali menjadi destinasi pariwisata yang jauh dari nilai-nilai pariwisata budaya. Padahal sejatinya, kehidupan sosial budaya masyarakat, dan pariwisata di Bali merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Komponen sosial budaya masyarakat adalah modal utama dalam pengembangan pariwisata Bali. Di dalam jaringan komponen tersebut, budaya agraris yang terwujud dalam tatanan desa *pakraman* (dulu disebut *desa adat*) dan Subak berfungsi sebagai pilar utama penyangga struktur sosial budaya yang ada. Artinya, faktor kunci keberhasilan pembangunan pariwisata Bali terletak pada keberlangsungan dua pranata tradisional tersebut. Idealnya pengembangan pariwisata Bali semestinya diarahkan agar mampu menciptakan pola hubungan saling menguntungkan (simbiotik-mutualistik) antara elemen-elemen desa *pakraman* dengan industri pariwisata. Dengan demikian pariwisata diharapkan akan menjadi bagian hidup dan mempunyai makna/memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa *pakraman* itu sendiri (Timothy dan Boyd, 2003).

Di tengah situasi dan kondisi yang saling bersilang-kelindan di atas, beberapa kalangan di Bali mencoba tetap optimistik dengan mendesain pola-pola pengembangan produk wisata yang dekat dengan prinsip-prinsip pariwisata budaya. Mereka mengembangkan produk wisata berbasis ekowisata

di beberapa desa potensial. Walaupun masih berupa rintisan (*pioneer*), eksperimen pengembangan ekowisata tersebut berupaya menerapkan prinsip-prinsip ekowisata sebagai terjemahan dari pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Bertitik-tolak dari pemikiran tersebut, tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan dan menganalisis proses perubahan (dinamika) yang terjadi dalam pengembangan ekowisata di Bali. Kajian diarahkan pada dua aspek penting yaitu aspek proses pelibatan masyarakat dan strategi pengembangan ekowisata. Proses tersebut itulah diharapkan dapat dihasilkan tipologi ekowisata dari berbagai jenis produk ekowisata yang ada di Bali serta model pengembangan ekowisata Bali ke depan.

Sejarah perkembangannya, istilah ekowisata mengalami dialektika pendefinisian, dengan tanpa meninggalkan substansinya yang pro-masyarakat lokal (*pro local people*) tersebut. Meskipun istilah ekowisata sudah sering dipergunakan oleh kalangan akademisi, pebisnis wisata, dan NGO, tetapi penggunaan istilah ekowisata masih sering dikacaukan (Galley, G., and Clifton, J., 2004). Salah satunya diberikan oleh Hector Cebalos Lascuarin (Lascuarin, 1987, dalam Boo, 1991) sebagai "*Traveling to undisturb area or uncontaminated natural areas with a specific objective of studying, admiring and enjoying the scenery and its wild plants and animals*". Konsep ini dipertegas lagi oleh David Western (1987) yang menyatakan bahwa ekowisata merupakan aktivitas wisata yang bertanggung jawab untuk kelestarian alamnya. Ekowisata harus mampu menciptakan dan memuaskan keinginan alam, dengan cara mengkonservasi, melestarikan ekologi, dan melibatkan peran aktif wisatawan dalam setiap pengembangan serta pembangunan.

Pengertian yang tidak jauh berbeda, *The International Ecotourism Society* (2002), mengerucutkan pengertian itu dengan mendefinisikan bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi

lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Aspek tanggungjawab dan kelestarian ini ditekankan lagi oleh ahli lainnya (Damanik, J. dan Weber, H.F., 2006), dengan meletakkan ekowisata sebagai kegiatan wisata berbasis alam, bersifat berkelanjutan, dikelola secara khusus, berdampak positif terhadap lingkungan, berorientasi pada lokal, tidak bersifat konsumtif, dan fokus pada pengalaman serta pendidikan tentang alam.

Berbagai definisi ekowisata yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa para ahli dan peneliti ekowisata lebih banyak melihat ekowisata dari sudut pandang perjalanan dan pasar (wisatawan). Padahal dalam penelitian kali ini, peneliti hendak lebih banyak melihat fenomena ekowisata sebagai sebuah produk yang tengah berubah. Dengan demikian definisi dan prinsi-prinsip yang digambarkan di atas hanya bisa dipergunakan untuk memberikan wawasan mendasar (*insight*) bagi peneliti dalam memahami ekowisata. Selanjutnya dari serangkaian pengertian dan prinsip-prinsip ekowisata di atas peneliti dapat merangkum poin-poin penting dari ekowisata untuk melihat fenomena ekowisata di Pulau Bali. Dengan memadukan berbagai definisi yang telah disampaikan para ahli sebelumnya, peneliti mencoba merumuskan definisi ekowisata dari sudut pandang pentingnya aspek produk dan aspek pelibatan masyarakat:

Ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam, di mana tujuannya selain untuk menikmati keindahan juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi lingkungan, dan pelibatan masyarakat setempat sekitar Daerah Tujuan Ekowisata dalam pengelolaannya.

### Tipologi Ekowisata

*American Heritage Dictionary* menjelaskan pengertian tipologi sebagai berikut, "*The study or systematic classification of types that have characteristics or traits in common*". Jadi, tipologi



adalah studi atau klasifikasi sistematis dari berbagai tipe yang mempunyai karakteristik atau kualitas bersama. Selanjutnya pengertian tentang tipologi yang lebih operasional dikemukakan oleh Waddock (1989). Ia merumuskan pengertian tipologi sebagai 'model organisasional yang secara sistematis menggambarkan bagaimana fenomena sosial bervariasi atau serupa dalam kaitannya dengan atribut-atribut tertentu' (Waddock, 1989 via Selin:263). Pengertian inilah yang akan dipergunakan dalam penelitian tentang tipologi ekowisata Bali ini.

Pentipologian berguna dalam pembangunan kepariwisataan lebih lanjut dari suatu destinasi. Pemahaman tipologi wisatawan berdasarkan negara dan daerah asal, gender, umur, strata sosial, ekonomi, budaya, dan iklim, misalnya, menjadi penting dalam konteks pencitraan destinasi (Gee,1997). Selain itu tipologi juga bermanfaat untuk mengetahui pola kunjungan, motivasi, dan dampak terhadap strategi promosi dan pemasaran. Dengan demikian, tipologi wisatawan dalam konteks ini dapat menjadi alat perencanaan yang efektif, sebagai petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dampak spasial, tolok ukur pertumbuhan, dan instrumen dalam menyusun formulasi kebijakan pariwisata. Sejalan dengan penjelasan ini, penyusunan tipologi ekowisata pun kurang lebih akan menghasilkan manfaat yang sama.

Salah-satu penelitian tipologi dilakukan oleh Lindberg (1991) yang menghasilkan tipologi ekowisata berdasarkan kriteria 'siapa' melakukan jenis perjalanan 'apa'. Ia memilah ekowisata ke dalam beberapa tipe, antara lain: (1) *hard-core*: peneliti atau anggota lainnya yang mengikuti perjalanan yang direncanakan ke suatu daerah dengan tujuan khusus, seperti mempelajari sesuatu, melestarikan lingkungan, atau tujuan-tujuan khusus lainnya, (2) *dedicated*: orang-orang yang melakukan perjalanan khusus untuk melihat area-area yang dilindungi dan ingin memahami alam setempat dan sejarah budaya, (3) *mainstream*: orang-orang yang mengunjungi destinasi-destinasi yang

bersifat khusus dengan mengambil sebuah paket perjalanan yang tidak umum, dan (4) *casual*: orang-orang yang ikut serta dalam suatu perjalanan ke alam bebas, tidak lebih dari sehari merupakan bagian dari liburan yang lebih panjang.

Dari berbagai jenis penerapan tipologi ekowisata dalam berbagai kajian, terdapat satu benang merah yang dapat dipetik bahwa tipologi lebih banyak dibuat dengan mengkaji aspek aktivitas wisatawan. Hal ini misalnya terlihat dari kajian yang dilakukan oleh Weaver (2001), Lindberg (1991), dan rumusan ekowisata Queensland (1995). Selin (1999) melakukan perumusan tipologi secara agak berbeda dengan melihat pola-pola kerjasama yang ada di berbagai kawasan dalam suatu destinasi.

Setidaknya dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhasil dikumpulkan, pengkajian tipologi ekowisata dengan melihat aspek 'siapa yang menggerakkan pengembangan ekowisata di suatu destinasi (*agent of change*). Dengan demikian tulisan ini mencoba menganalisis tipologi ekowisata Bali dari sudut pandang 'penggerak ekowisata', sekaligus melihat dinamika pelibatan masyarakat dan strategi pengembangannya. Secara spesifik tujuan tulisan ini sebagai berikut: (a) menganalisis tipologi ekowisata yang berkembang di Bali dan (b) menganalisis dan merumuskan model pengembangan ekowisata yang dapat dibangun.

Tulisan ini dibangun dari hasil penelitian yang dikerjakan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendekatan kualitatif dan pilihan teori yang diambil dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan cenderung bersifat deskriptif dan bukan tabulasi seperti dalam pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang memiliki relevansi dengan pendekatan dan kerangka teori tersebut, ada empat cara, yaitu: (a) wawancara mendalam (*indepth interview*), (b) Pengamatan (observasi lapangan), (c) diskusi terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*), dan (d) studi dokumen. Penelitian ini menggunakan keempat metode ini untuk menggali

kebutuhan data di lapangan, sesuai dengan lingkup masalah dan tujuan penelitian.

## PEMBAHASAN

### Tipologi Ekowisata

Penelitian ini berhasil diidentifikasi 42 Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang diklasifikasi sebagai ekowisata. Masing-

masing DTW memiliki potensi, ragam atraksi, segmen pasar, dan tingkat perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Melalui sebuah instrumen sederhana berupa kuisioner sederhana 42 DTW ekowisata tersebut diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok atau tipe tertentu sesuai dengan karakteristiknya.

Tabel 1. Tipologi Ekowisata di Bali

Tipe Ekowisata	Produk dan Jenis Atraksi	Strategi Pengelolaan	Pola Pelibatan Masyarakat	Karakter wisatawan
(1) <b>Tipe Investor</b> (Elephant Safari Park, Bali Zoo Park, Bali Bird Park, Bakas Safari, Bali Safari and Marine Park)	a. Taman b. Menunggang satwa langka c. Wisata pantai d. Arung Jeram e. Panorama alam	a. Aktor : Investor asing dan domestik b. Model kerjasama timpang,	a. Partisipasi masyarakat lokal rendah b. Pembagian keuntungan ekonomi kepada banjar	Casual/ popular Soft activity
(2) <b>Tipe Pemerintah</b> (Taman Nasional Bali Barat, Kebun Raya Bedugul, Desa Baha, Pangsan, Penglipuran, Bayunggede)	a. Desa wisata; b. Kunjungan singkat ke desa-( <i>Sight seeing</i> ).	a. Kerja sama desa dengan pemda b. Masyarakat diwakili banjar.	a. Partisipasi masyarakat rendah - sedang. b. Banjar Aktif	Casual/popular Soft activity
(3) <b>Tipe Masyarakat</b> (Monkey Forest, Burung Kokokan, JED (Dukuh, Sibetan, Ceningan, Tenganan, Plaga),	a. Aktif bersama warga desa, <i>trekking, hiking,</i> b. <i>Bird watching</i>	a. Pengelolaan sepenuhnya masyarakat lokal: koperasi primer dan Banjar.	a. Partisipasi masyarakat tinggi b. Pola partisipatif: <i>training, workshop.</i>	a. Popular b. Small group c. Hard activity

Sumber: Analisis Data lapangan (2012-2013), dan studi dokumen pada penelitian Weaver, (2001); Lindberg, (1991); Queensland, (1995), dan Selin, (1999).

Beberapa aspek yang digali dan dikumpulkan pada saat di lapangan, antara lain: (1) bentuk produk dan jenis atraksi yang dipasarkan; (2) Inisiator ekowisata dan manajemen pengelolaan, (3) keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan, kontrol terhadap sumber daya, terserap sebagai tenaga kerja, dan ada atau tidaknya hasil keuntungan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan (4) peranan pemerintah dalam setiap tahapan proses. Hasil pencapaian optimal dari proses tersebut tergambar dalam Matrik 1.

Dari temuan di atas terlihat bahwa tipologi ekowisata Bali dilihat dari sisi aktor utama yang menggerakkan (*agent of change*) serta manajemen pengelolaan yang diterapkan dapat dipilah menjadi tiga, yaitu (1) ekowisata yang digerakkan oleh investor (tipe Investor), (2) ekowisata yang digerakkan oleh masyarakat (tipe Partisipatif), dan (3) ekowisata yang digerakkan oleh pemerintah (tipe pemerintah). Berikut ini adalah penjelasan karakteristik dari masing-masing tipe ekowisata di Bali tersebut.

### **Tipe Investor (Banjar Taro Kaja dan Bali Elephant Park)**

Ekowisata dengan tipe investor artinya perencanaan dan pengembangan ekowisata dilakukan oleh pemilik modal dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan dari sisi bisnis karena bertujuan untuk kepentingan bisnis, maka pemakaian label ekowisata hanya bersifat artifisial atau pencitraan. Ketika wacana global dipenuhi oleh isu lingkungan termasuk dalam sektor pariwisata (*green tourism*), maka isu lingkungan tersebut juga digunakan oleh para pemilik modal untuk melebarkan sayap bisnisnya. Maka bermunculanlah bermacam bentuk pariwisata yang menamakan diri sebagai *ecotourism* atau *green tourism*.

Ekowisata dengan tipe investor yang berkembang di Bali dicirikan oleh peran dominan pemilik modal dari luar kawasan, bahkan dari luar negeri dalam mengelola ekowisata. Modal memiliki faktor penting di dalam mengendalikan operasional ekowisata mulai sejak perencanaan, pengelolaan hingga pembagian hasil usaha ekowisata. Dengan akumulasi modal pula, pengusaha ekowisata menjalankan usaha bisnisnya agar dapat meraih keuntungan dalam jangka waktu yang telah ditargetkan. Sesuai dengan sifat modal yang selalu ekspansif, usaha ekowisata yang digerakkan pun senantiasa menjadikan keuntungan finansial sebagai target utama (Arida, N.S dan Damanik, J., 2012).

### **Tipe Pemerintah (Desa Pengelipuran, Bangli)**

Pada ekowisata dengan tipe pemerintah dicirikan oleh adanya peran dan intervensi pemerintah yang besar dalam pengembangan ekowisata di sebuah desa. Intervensi pemerintah yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Dinas Pariwisata tersebut biasanya berlabel 'pengembangan desa wisata'. Desa-desanya yang dikembangkan sebagai desa wisata pada umumnya memiliki potensi budaya dan alam yang besar.

Ekowisata dengan tipe pemerintah memiliki beberapa karakter yang menonjol dalam strategi pengembangannya, antara

lain: mengandalkan peran pemerintah yang dominan, cenderung duplikasi, berskala kecil, dan meminggirkan peran masyarakat. Kuatnya peran pemerintah merupakan karakteristik utama dari tipe ini karena dimulai dan berkembangnya ekowisata memang diinisiasi oleh Pemerintah, dalam hal ini Dinas Pariwisata. Pemerintah memegang peranan yang penting dengan mengerahkan segenap sumber daya yang ada untuk mendorong terwujudnya ekowisata (desa wisata) di sebuah desa. Dengan demikian program ekowisata bersifat *top down* dari atas ke bawah, instruksional, dan minim partisipasi.

Desa-desanya ekowisata bertipe pemerintah mengandalkan *landscape* desa dan kekayaan budaya sebagai basis atraksi dan produk ekowisatanya. Beberapa desa Baliage di wilayah pegunungan Bali Tengah yang memiliki khasanah budaya 'Bali asli' dipromosikan dengan gencar oleh beberapa Pemerintah daerah kabupaten karena diyakini dapat menjadi magnet daya tarik wisata. Desa-desanya tersebut memiliki pola pemukiman yang khas dan kehidupan adat-istiadat yang mencerminkan keunikan kebudayaan. Beberapa desa lainnya mengandalkan kehidupan budaya agraris Subak dengan segala pernak-perniknya. Akan tetapi, berbeda dengan desa-desanya dalam tipe Masyarakat yang rata-rata berhasil menggali keunikan masing-masing untuk ditonjolkan dan dikemas menjadi atraksi, pada desa-desanya tipe Pemerintah keunikan potensi tersebut jarang yang dapat diungkap untuk dijadikan *branding* produk. Potensi hutan bambu di Desa Pengelipuran, Bangli, misalnya tidak dapat tergarap maksimal sebagai produk wisata yang semestinya mampu menunjang keberadaan desa tersebut sebagai desa wisata. Demikian juga beberapa desa lainnya di wilayah kabupaten lainnya, seperti Desa Pingge, Tabanan; Desa Lodtunduh, Gianyar, dan Desa Baha, Badung. Desa-desanya tersebut digadang-gadang menjadi Desa Wisata berbasis agro (pertanian), tetapi 'gagal' mengkerucutkan *brand* tersebut menjadi lebih spesifik sehingga bisa utuh menjadi milik desa tersebut.

### **Tipe Masyarakat (Banjar Dukuh, Sibetan, Karangasem)**

Ekowisata yang dirintis dan dikelola oleh warga masyarakat dan sepenuhnya berada dalam kontrol masyarakat setempat dalam penelitian ini digolongkan sebagai ekowisata bertipe Masyarakat (*grass root*). Warga masyarakat baik secara mandiri maupun dengan dibantu pendampingan dari pihak luar (tokoh atau LSM), berinisiatif membangun dan mengembangkan ekowisata yang bersumber dari potensi sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut. Perkembangan ekowisata tipe ini pada umumnya berjalan secara natural mengikuti tahapan-tahapan proses pemahaman yang dimiliki warga desa.

Tipe ekowisata masyarakat memiliki beberapa karakter khas dalam strategi pengembangannya, antara lain; melibatkan masyarakat secara maksimal, berskala kecil baik dalam tampilan atraksi maupun modal yang dimiliki, dan berjejaring (*networking*). Ciri yang paling menonjol dari ekowisata tipe Masyarakat adalah tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengelola ekowisata. Pada beberapa kasus, masyarakat malah merupakan pelaku aktif dengan menggunakan pranata atau lembaga tradisional yang dimiliki seperti *banjar*, *sekehe*, dan *subak*. Pada beberapa contoh ~misalnya JED (Jaringan Ekowisata Desa)~ keterlibatan masyarakat terbentuk akibat adanya campur tangan (intervensi) dari pihak luar seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akan tetapi, beberapa desa ekowisata yang muncul lebih awal, partisipasi masyarakat tersebut tumbuh secara alami dan mandiri, dengan adanya pemicu dari seorang atau beberapa tokoh warga lokal (misalnya pada kasus desa Munduk, Tabanan, dan Desa Kemenuh, Sukawati). Selanjutnya, masyarakat mengupayakan pembangunan dan pengelolaan ekowisata di desanya secara swadaya, swakarsa, dan swakelola. Fenomena demikian misalnya dapat dilihat dari obyek wisata alam Wanara Wana (*monkey forest*), desa adat Padangtegal, Ubud; wisata alam Burung Kokokan, Petulu, Ubud; dan wisata alam Kera, Sanggeh, Badung.

Tujuan pengembangan ekowisata dalam hal ini memang tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan finansial semata. Dengan kata lain, paling tidak masyarakat menyadari bahwa apa yang mereka kerjakan melalui ekowisata tidak akan dapat memperoleh keuntungan finansial secara cepat dan instant. Dalam konstruksi kesadaran demikian masyarakat lebih mengasosiasikan ekowisata sebagai sebuah instrumen untuk mengenali dan menggali sumber daya yang dimiliki dan mengemasnya menjadi sebuah produk wisata. Dengan demikian sisi bisnis dari pengembangan wisatanya tersebut tidak terlampau mendapatkan perhatian. Alih-alih dikembangkan secara profesional dan memenuhi perhitungan bisnis murni.

### **Sebaran Ekowisata Bali: Sebuah Analisis Kewilayahan**

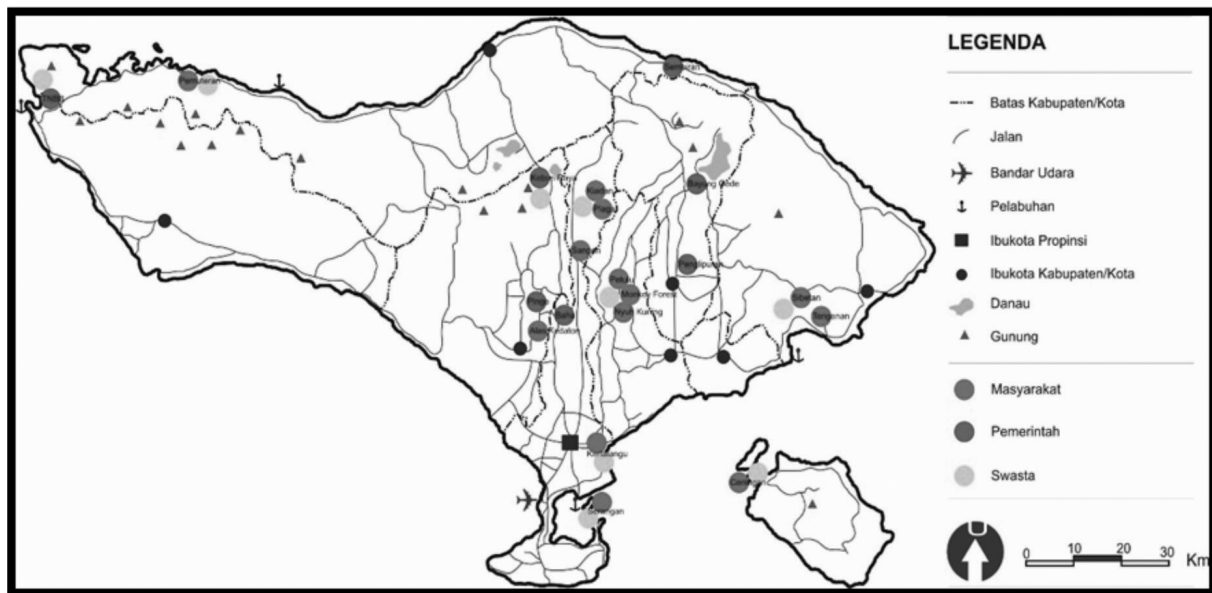
Dalam wilayah kepariwisataan Bali, sebaran produk-produk ekowisata yang telah berkembang ternyata juga mengikuti pola persebaran produk atau Daerah Tujuan Wisata konvensional. Beberapa objek ekowisata yang bertipe Masyarakat malah berada di dalam sebuah kawasan wisata konvensional. Obyek ekowisata *monkey forest* desa Padangtegal, burung Kokokan Petulu, dan banjar Nyuh Kuning, misalnya, masih berada di dalam kawasan pariwisata Ubud dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kepariwisataan dalam kawasan tersebut.

Beberapa obyek ekowisata bertipe Masyarakat lainnya memang berlokasi jauh dari sentra-sentra kawasan dan daerah wisata yang sudah ada. Obyek Jatiluwih, banjar Dukuh Sibetan, desa Munti gunung, misalnya lokasinya cukup jauh dari sentra-sentra daerah wisata. Kondisi ini, secara positif memberikan karakter yang lebih kuat bagi obyek-obyek tersebut karena tidak berada di bawah bayang-bayang kebesaran citra obyek wisata konvensional. Akan tetapi, pada sisi lain, obyek-obyek tersebut memerlukan upaya yang lebih keras dalam mempromosikan keunggulannya agar terjangkau oleh segmen pasarnya.



Secara lebih jelas, sebaran peta ekowisata di Bali dapat dilihat pada Gambar 1. Pada gambar tersebut terlihat bahwa sebaran ekowisata di Bali pada umumnya berada di wilayah Bali Selatan dan Bali Tengah (Bali pegunungan), khususnya di kawasan-kawasan wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah Bali, seperti Ubud, Kuta, Nusa Dua, dan Pantai

Lebih. Meskipun begitu, beberapa produk ekowisata juga berada di luar kawasan tersebut, seperti di Buleleng, Karangasem, dan Jembrana. Salah satu ciri umum yang menonjol dari pemilihan lokasi tersebut adalah produk-produk ekowisata banyak dikembangkan di kawasan pedesaan yang masih tergolong asri dan alami, seperti keberadaan *Elephant Safari Park* di Taro.



Gambar 1. Peta Sebaran Ekowisata di Bali

Apabila dilihat per-tipe, ekowisata tipe Investor lebih banyak berpusat di Bali Selatan, khususnya di Kabupaten Gianyar dan Badung. Sedangkan tipe Pemerintah keberadaannya merata di seluruh kabupaten di Bali, tetapi yang berada di kabupaten-kabupaten di Bali Selatan relatif lebih berkembang, sebagai imbas dari pengaruh pusat-pusat kawasan wisata yang memang lebih banyak berada di Bali Selatan. Sementara itu ekowisata bertipe Masyarakat dengan sub tipe alami lebih banyak berada di Bali Selatan. Akan tetapi, ekowisata subtype ekowisata yang didampingi oleh LSM lebih banyak berlokasi di wilayah-wilayah 'pinggiran', seperti di Kabupaten Karangasem (Tenganan dan Sibatana), Badung bagian Utara (Banjar Kiadan), dan Klungkung kepulauan (Pulau Ceningan).

Dari keseluruhan produk ekowisata yang ada dalam peta, terlihat bahwa produk ekowisata yang paling mendekati bentuk dan ciri-ciri ideal dari ekowisata secara konseptual (tipe Masyarakat) jumlahnya masih sedikit. Lokasinya pun cenderung berada di wilayah-wilayah 'pinggiran'. Fakta ini mengafirmasi bahwa berbagai bentuk ekowisata yang diidealkan di Bali, sebenarnya juga masih sulit untuk bisa ditemukan rujukan bentuk praktisnya. Walaupun demikian, ini bukan berarti ekowisata Bali gagal mewujudkan implementasi konseptualnya, tetapi pengaruh penetrasi pasar dan para pelaku bisnis di produk wisata bertipe investor yang jauh lebih kuat sehingga memiliki pengaruh besar dalam mendorong terjadinya perubahan bentuk ekowisata ideal menuju bentuk replikasi ekowisata atau *pseudo*-ekowisata.

## Strategi Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata ketiga desa melakukan strategi yang berbeda-beda sesuai dengan konteks persoalan yang dihadapi (Matrik 2). Pilihan strategi yang ditempuh tentu berhubungan dengan model pemberdayaan masyarakat yang terjadi dan pengembangan produk ekowisata yang dilakukan pada masing-masing desa. Pada beberapa dimensi pilihan-pilihan strategi yang ditempuh memiliki pola yang mirip. Beberapa kesamaan pola yang muncul,

antara lain: menggunakan landscape desa sebagai basis atraksi, memakai lembaga banjar/desa adat sebagai instrumen negosiasi dengan pihak luar, menjalin jaringan (*networking*) dengan multi stakeholders, dan mengembangkan promosi serta informasi melalui perangkat internet. Keseluruhan strategi dipergunakan untuk mengakselerasi segala sumber daya pariwisata lokal guna meraih kesejahteraan bersama melalui pengembangan ekowisata.

Tabel 2. Perbandingan dalam Strategi Pengembangan Ekowisata di Tiga Desa/Tipe

Desa	Strategi Pengembangan Ekowisata
Taro (Tipe Investor)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dengan investor besar.</li> <li>Memanfaatkan hubungan patronase kultural dengan tokoh puri Ubud yang sekaligus merupakan Bupati Gianyar.</li> <li>Menggunakan kekuatan banjar adat ketika bernegosiasi dengan investor.</li> <li>Memanfaatkan pura sebagai simpul konsolidasi dalam penggunaan keuntungan usaha ekowisata.</li> <li>Promosi produk menggunakan jaringan Internet.</li> </ol>
Penglipuran (Tipe Pemerintah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bekerja sama dengan Pemerintah daerah (Dinas Pariwisata Kabupaten) dalam mengembangkan ekowisata.</li> <li>Mengikuti bermacam lomba pariwisata guna mempromosikan ekowisata desa.</li> <li>Menggunakan institusi banjar sebagai penanggungjawab dalam mengelola ekowisata,</li> <li>Memanfaatkan jasa travel agen dalam mendapatkan kunjungan wisatawan.</li> <li>Memanfaatkan pura sebagai ikon produk ekowisata.</li> </ol>
Dukuh, Sibetan (Tipe Partisipatif)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bekerjasama dengan LSM.</li> <li>Mengembangkan paket-paket wisata berbasis potensi desa.</li> <li>Merumuskan Tata Ruang Wilayah Desa sebagai alat untuk menjaga keutuhan fungsi kawasan wilayah banjar.</li> <li>Membentuk koperasi primer di banjar untuk kelola ekowisata.</li> <li>Menggunakan pengaruh dan kekuatan banjar adat dalam mengembangkan ekowisata.</li> <li>Membangun jaringan dengan desa-desa lain dalam wadah JED dan Bali DWE.</li> </ol>

Sumber: Survey dan wawancara lapangan (2012-2013).

## Persamaan dan Perbedaan Pilihan Strategi

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa tiga desa yang mewakili tipe-tipe ekowisata yang dikaji menampilkan karakteristik yang menarik dalam hal penerapan strategi pengembangan ekowisata. Terdapat beberapa titik kesamaan dan perbedaan di dalam

proses strategi pengembangan bila dicermati dari uraian sebelumnya. Kesamaan pola yang muncul dijelaskan berikut ini.

*Pertama*, munculnya peran 'orang kuat' dalam proses awal pengembangan ekowisata di masing-masing tipe. Pada tipe Investor 'orang kuat' tersebut tersimbolisasi pada figur kepala daerah sekaligus tokoh Puri Ubud, yaitu

Cokorde Budi Suryawan (CBS). Demikian pula pada tipe Pemerintah 'orang kuat' ter-simbolisasi pada figur Bupati Ida Bagus Ladip (IBL). Kemiripan pada dua tipe tersebut bahwa kemunculan 'orang kuat' dalam proses awal inisiasi ekowisata selain karena alasan formalitas politik kenegaraan (sebagai kepala daerah), juga terkandung alasan keterkaitan kultural. Bupati CBS merupakan salah-satu tokoh Puri Ubud, di mana antara warga Taro Kaja dengan Puri Ubud memiliki relasi patron-klien sejak lama. Sedangkan di antara warga Penglipuran dengan Bupati IBL memiliki keterkaitan *cultural guru~sisya*. Pada kasus Taro Kaja, kehadiran 'orang kuat' sangat menentukan dan membantu warga Taro Kaja dalam bernegosiasi dengan investor. Sedangkan di Penglipuran, sebaliknya, kehadiran peran 'orang kuat' justru menjadi instrumen penundukan (hegemoni) pemerintah daerah terhadap kemampuan masyarakat lokal Penglipuran dalam mengelola desa wisatanya secara mandiri dan partisipatif. Hal ini dengan benderang terlihat dalam penetapan prosentase bagi hasil retribusi yang sangat tidak adil.

Sementara itu pada tipe Masyarakat (Banjar Dukuh), kehadiran 'orang kuat' muncul pada perkembangan terakhir perjalanan ekowisata, di mana Bupati Kabupaten Karangasem mengajak investor asal Jepang untuk berinvestasi di banjar Dukuh. Masyarakat pun terbelah dalam menyikapi kehadiran investor tersebut; sebagian ada yang setuju dan melihat hal tersebut sebagai sebuah peluang baru setelah lelah menunggu keuntungan dari ekowisata. Sementara sebagian warga lainnya tidak setuju dengan kehadiran investor karena dinilai dapat mengancam kedaulatan warga terhadap sumber daya alamnya. Fenomena tersebut menjadi ujian dari proses panjang pemberdayaan masyarakat Dukuh.

Fenomena di tiga desa di atas mencerminkan bahwa pengembangan ekowisata pada tipe Investor dan Pemerintah cenderung berpola elitis. Artinya hanya melibatkan orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan dan akses. Asumsi yang dibangun bahwa aktor sosial yang terlibat dalam pembangunan

pariwisata bersifat heterogen, sehingga interaksi yang terjadi diwarnai oleh berbagai konflik kepentingan. Aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan pariwisata diklasifikasinya ke dalam dua pola, yaitu pola elitis dan partisipasi masyarakat. Pola elitis cenderung didominasi oleh segelintir orang dan bersifat langsung karena kekuasaan yang dimilikinya. Hal inilah yang terjadi di Taro Kaja dan Penglipuran, di mana proses ekowisata dikendalikan oleh sekelompok kecil elite.

Sedangkan pengembangan ekowisata di Dukuh, Sibetan, cenderung lebih menunjukkan pola partisipatif dengan melibatkan banyak orang, tetapi hubungannya bersifat tidak langsung karena membutuhkan perantara warga masyarakat. Pembangunan ekowisata yang dilakukan, banyak ditandai oleh suatu perjuangan melalui proses negosiasi-negosiasi, dan kesepakatan-kesepakatan bersama sebagai pedoman dalam menkonstruksikannya.

*Kedua*, digunakannya pranata tradisional banjar/desa adat untuk mengelola ekowisata. Pada ketiga tipe ekowisata masyarakat menggunakan instrumen banjar/desa adat sebagai pihak pemegang otoritas pengelolaan ekowisata. Penggunaan lembaga banjar/desa adat (dan bukan dusun/desa dinas) jelas memiliki landasan argumentasi yang bernuansa politik. Landasan argumentasinya bahwa institusi banjar dipandang lebih memiliki kekuatan dan kharisma ketika berhadapan dengan kekuatan suprastruktur (baik pemerintah maupun investor).

Dari berbagai cerita kasus pengembangan ekowisata jelas terlihat betapa institusi tradisional banjar pakraman dipergunakan secara efektif sebagai instrumen untuk mengakumulasikan, mengkoordinir, dan mensinergikan modal-modal internal lainnya. Sehingga mereka menjadi lebih kuat dan solid dalam menghadapi aktor-aktor dari luar, seperti pemerintah, investor, biro perjalanan, dan sebagainya. Kekuatan *banjar pakraman* sangat diandalkan karena kewibawaannya masih diakui oleh anggota warga banjar. Dalam praktiknya, banjar/desa adat membentuk Badan Pengelola Pariwisata (atau

sebutan lain) yang menjadi perpanjangan tangan banjar dalam mengelola ekowisata. Namun wewenang dan tanggung-jawab masih dikendalikan oleh banjar.

*Ketiga*, digunakannya simbol-simbol yang bersifat tradisional dalam proses menyatukan sikap masyarakat dalam menghadapi dinamika ekowisata. Simbol-simbol dan pranata tersebut, salah satunya berupa sistem pura. Pura dipergunakan sebagai simpul pemersatu dalam mencegah timbulnya konflik ketika merespons hasil ekonomi ekowisata. Pada ketiga tipe, dengan jumlah hasil ekonomi pengelolaan ekowisata yang sangat beragam, terlihat pemanfaatan dominan hasil ekowisata adalah untuk kebutuhan pura, baik untuk kepentingan pembangunan dan pemeliharaan bangunannya maupun untuk biaya penyelenggaraan upacara. Dengan demikian seluruh warga masyarakat merasakan manfaatnya karena beban mereka untuk mengeluarkan iuran sosial ke pura (*pesuan-pesuan*) menjadi lebih ringan.

*Keempat*, aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan ekowisata di ketiga desa menunjukkan adanya kecenderungan perluasan dalam hal jumlah dan intensitas interaksi antar-aktor (*stakeholder*). Pada tahap awal perkembangan masing-masing tipe ekowisata terjadi dominansi peran oleh aktor tertentu (sesuai dengan nama tipenya; pada ekowisata bertipe Investor misalnya aktor yang dominan ialah investor), namun dalam proses perjalanannya kemudian aktor-aktor lainnya mulai masuk dan terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Munculnya keterlibatan peran aktor baru tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran karakteristik dari tipe ekowisata yang semula dominan menjadi bercampur/hibrid (Proses pergeseran karakter ini secara khusus akan dibahas dalam sub bab terakhir bab ini.)

Sedangkan perbedaan pola yang terlihat adalah sebagai berikut: *Pertama*, terdapat perbedaan yang mencolok dalam hal *basis dan pengemasan atraksi ekowisata*. Pada tipe investor, basis atraksi yang digunakan merupakan potensi yang didatangkan dari luar desa, bahkan luar provinsi (import), sehingga atraksi yang muncul adalah atraksi

yang sangat asing dengan potensi lokal yang ada di desa tersebut. Sedangkan pada desa ekowisata bertipe Masyarakat (*grass root*) atraksi ekowisatanya bersumber dari potensi sumber daya lokal yang dimilikinya karena yang dijual adalah milik sendiri, masyarakat dapat berdiri sejajar dengan wisatawan. Masyarakat berperan menjadi penutur kekayaan budayanya sendiri (*local interpreter*), sehingga dapat lebih terlibat dalam kegiatan ekowisata. Kondisi ini bermuara pada sikap masyarakat yang lebih berbangga dengan apa yang dimilikinya, apa yang dilakukan, dan apa yang ditawarkan kepada wisatawan. Sementara itu pada tipe Pemerintah terjadi ambiguitas; sebagian potensi lokal berhasil dikemas menjadi atraksi wisata, sedangkan sebagian lagi masih terpendam dan tersembunyi karena belum mendapat sentuhan inovasi untuk menjadi atraksi ekowisata, misalnya; potensi hutan bambu di Desa Penglipuran. Ada ketidakbersambungan (diskoneksitas) pada beberapa aspek, antara apa yang 'dimiliki' dengan apa yang 'dijual' kepada wisatawan.

*Kedua*, terdapat perbedaan dalam hal *kapasitas dan kemampuan inovasi masyarakat lokal dalam mengelola ekowisata*. Pada tipe Masyarakat yang tampak dominan adalah kekuatan dan modal sosial masyarakat lokal dalam mengelola ekowisata desanya. Kekuatan lokal tersebut terlihat melalui inovasi-inovasi dan kreativitas yang senantiasa tumbuh dan berkembang dalam merespons persoalan yang ada. Sedangkan pada tipe investor yang tampak dominan adalah peran investor dalam pengelolaan atraksi ekowisata. Masyarakat lokal hanya berperan sebagai obyek dan penikmat hasil pengusahaan ekowisata. Pada situasi tertentu investor dijadikan 'sapi perah' oleh pihak desa adat.

Kondisi relasi transaksional demikian masyarakat desa adat kehilangan elemen vitalnya dalam mengelola segenap potensi sumber daya pariwisata yang dimilikinya. Sementara itu pada ekowisata bertipe Pemerintah, kekuatan inovasi lokal masyarakat seolah-olah berada di bawah kontrol pemerintah daerah. Masyarakat tidak



berani mengambil inisiatif bila tidak ada instruksi atau arahan dari Pemerintah. Baru belakangan (tahun 2012) masyarakat bergerak membentuk Badan Pengelola Desa Wisata sebagai bentuk kesadaran baru dalam memanfaatkan potensi desanya.

Dari butir *pertama* dan *kedua* di atas, apabila produk ekowisata dibuat oleh pengusaha dengan melibatkan kekuatan kapital yang besar, maka produk ekowisata hanya mengikuti keinginan wisatawan. Produk yang dikreasi didesain untuk memenuhi selera pasar sesuai dengan tren global yang sedang digemari. Guna pemenuhan kebutuhan pasar tersebut faktor-faktor produksi pariwisata bekerja mengeksploitasi sumber daya yang ada di destinasi ekowisata dengan tidak begitu memperhatikan aspirasi masyarakat lokal atau sekitar destinasi. Sedangkan pada destinasi ekowisata yang menjadikan masyarakat lokal sebagai pelaku jasa pariwisata (Tipe Masyarakat), produk-produk ekowisata yang disajikan bagi wisatawan merupakan akumulasi proses partisipasi aktif dari segenap stakeholders masyarakat, NGO, dan kalangan kreatif lainnya.

*Ketiga*, terdapat perbedaan *tingkat kesadaran terhadap pentingnya penguasaan terhadap 'ruang hidup bersama' di ketiga tipe*. Ruang hidup bersama maksudnya adalah segenap wilayah desa sebagai basis produksi pariwisata. Pada tipe Masyarakat sejak awal pengembangan ekowisata, masyarakat sudah menjaga ruang hidupnya dengan membuat Tata Ruang Wilayah Desa sebagai bentuk antisipasi terhadap gempuran luar, terutama investor. Sedangkan pada desa bertipe Pemerintah, kesadaran untuk menjaga ruang hidup tersebut muncul belakangan, jauh setelah pariwisata masuk merasuki sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Masyarakat desa Penglipuran, misalnya, berencana akan membuat Tata Ruang Wilayah Desa mereka setelah mencermati perkembangan penggunaan lahan di sekitar desanya yang semakin mengkuatirkan. Sementara itu pada ekowisata tipe Investor serta inisiatif menjaga ruang hidup bersama tersebut hampir tidak

ada. Area berdirinya wisata gajah di Taro Kaja sendiri merupakan Tanah Adat yang 'secara sadar' diserahkan (dalam skema hak guna pakai jangka panjang) kepada investor untuk dipakai sebagai sebagian aset pengelolaan ekowisata. Jalan koridor Taro-Ubud juga berkembang pesat berbagai properti bercorak villa yang banyak dimiliki orang asing.

*Keempat*, dari proses yang terjadi di ketiga desa terlihat bahwa hasil pengelolaan ekowisata tidak selalu berupa uang (manfaat ekonomi), seperti yang terlihat menonjol terjadi di Banjar Taro Kaja, tetapi hasil tersebut bisa pula berupa hasil non-ekonomi. Hasil tersebut misalnya berupa: (a) meningkatnya rasa bangga warga desa terhadap keberadaan desa mereka (kasus banjar Dukuh, Sibetan dan Penglipuran); (b) meningkatnya soliditas dan setia kawan antara desa-desa pelaku ekowisata (kasus JED pada 4 desa); dan (c) meningkatnya kapasitas warga yang terlibat langsung dalam proses ekowisata. Kapasitas tersebut dalam perjalanannya tidak hanya penting untuk mengelola pariwisata di desa, tetapi juga berguna dalam mengatasi problem-problem lainnya di desa (kasus Dukuh, Sibetan). Dalam banyak situasi, hasil non-ekonomi tersebut justru lebih bermanfaat dan lebih dirasakan dari pada manfaat uang (Arida, N.S., 2009). Sebaliknya, keberlimpahan hasil ekonomi di Taro Kaja pada beberapa aspek malah sering memantik konflik baru di tengah kehidupan masyarakat karena rendahnya kemampuan mengelola hasil ekowisata bagi kesejahteraan segenap warga dan munculnya budaya koruptif di tengah kehidupan desa yang sebelumnya bersih dan saling mempercayai.

*Kelima*, desa-desa yang tergolong tipe Masyarakat menggunakan strategi berjejaring (*networking*), sementara dua tipe lainnya strategi demikian kurang terlihat. Strategi ini dapat dilihat dari pengembangan ekowisata yang dilakukan oleh desa-desa yang menghimpun diri dalam kelompok JED (Jaringan Ekowisata Desa). Pada awalnya kelompok ini hanya terdiri dari 4 desa dengan didampingi oleh Yayasan Wisnu. JED berbentuk koperasi sekunder, sedangkan keempat desa sebagai

anggota JED membangun koperasi primer agar bisa berafiliasi dengan JED. Akan tetapi, keberadaan koperasi primer di masing-masing banjar tetap berada di bawah payung lembaga banjar adat. Pada tahun 2005, JED memperluas jaringannya dengan membentuk Bali DWE (Bali Desa Ekowisata Ekologis). Melalui Bali DWE mereka pun membuka keanggotaan sebagai desa ekowisata bagi desa-desa lainnya yang berminat. Bali DWE melakukan upaya standarisasi ekowisata yang berbasis kearifan lokal.

### Ekowisata Berpola Serba Tiga

Tipologi yang dihasilkan maupun pilihan strategi yang diterapkan pada masing-masing studi kasus tipe ekowisata, terlihat sebuah benang merah yang melambri hasil kajian penelitian ini. Benang merah itu berupa adanya suatu pola 'serba tiga' dalam tipe-tipe ekowisata Bali, yaitu tipe investor (swasta), masyarakat, dan pemerintah (lihat tabel 1). Pola 'serba tiga' ini muncul pada level makro (pulau/provinsi) maupun mikro, yaitu level desa ekowisata. Pada terminologi lokal (bahasa Bali) pola serba tiga demikian dikenal dengan istilah *tri ning tri*, sehingga pola serba tiga yang muncul dalam pola pengembangan ekowisata Bali ini pun dinamai ekowisata *tri ning tri*. Dengan demikian penelitian ini meneguhkan bahwa pola ekowisata *tri ning tri* ini akan dapat ditemukan di setiap wilayah pulau Bali; Bali Selatan, Bali Tengah (pegunungan), maupun Bali Utara. Pada pembahasan yang lain dapat diungkapkan bahwa terwujudnya sebuah atraksi ekowisata di suatu wilayah atau lokasi setidaknya-tidaknya harus disokong oleh tiga komponen, yaitu pihak masyarakat lokal sebagai pemilik dan pengampu

wilayah, pihak investor/swasta (lokal, nasional, ataupun global) sebagai pihak yang mendukung pendanaan, dan pihak pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin usaha kepariwisataan dan memfasilitasi pembangunan kepariwisataan.

Demikianlah, ternyata konsepsi serba tiga ini tidak hanya ditemukan dalam pola penyebaran ekowisata pada level makro Pulau Bali, tetapi menelusup ke bagian-bagian kehidupan juga, yaitu cara berpikir dan berkeyakinan yang paling substil dari masyarakat Bali, yang dalam penelitian ini direpresentasi oleh ketiga desa ekowisata. Pada terminologi Bali pola 'serba tiga' ini dikenal dengan istilah *tri ning tri* (kalau polanya serba 4 disebut *kanda pat*). Beranjak dari sinilah kemudian penelitian ini hendak meneguhkan dengan memberikan nama pola ekowisata Bali ini sebagai ekowisata *tri ning tri*, yaitu sebuah pola ekowisata yang memiliki kecenderungan senantiasa terpilah menjadi tiga. Ekowisata *tri ning tri* merupakan sebuah pola ekowisata yang khas dan otentik Bali.

Dalam konteks hasil penelitian ini; tiga tipe ekowisata yang dihasilkan juga bisa dipilah sesuai kerangka pemahaman ruang masyarakat Bali, yaitu konsepsi *Tri Mandala* (tabel 3). Dari matrik tersebut terlihat bahwa ekowisata Bali pun dapat dipahami sebagai sebuah pengelompokan berjenjang sesuai dengan kualitasnya, diawali dengan jenjang terendah, sedang, dan tinggi. Hal ini kualitas tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekowisata TIES. Berdasarkan hasil penilaian kualitatif tersebut, maka ekowisata tipe Investor termasuk ekowisata *nista*, ekowisata tipe Pemerintah termasuk ke dalam ekowisata *madya*, dan ekowisata tipe Masyarakat termasuk ke dalam ekowisata *utama*.

Tabel 3. Ekowisata Tri ning Tri dalam Kerangka Pemahaman Lokal 'Tri Mandala'

Item	Aspek 'Tri Mandala'			Desa/banjar yang menerapkan
	Utama Mandala	Madya Mandala	Nista Mandala	
Pemaknaan Kosmologi Bali	<i>Parahyangan</i> Kepala ( <i>Tri angga</i> ) Hulu, sakral	<i>Pawongan</i> Badan Tengah (transisi)	<i>Palemahan</i> Kaki <i>Teben</i> (hilir), Profan	

Item	Aspek 'Tri Mandala'			Desa/banjar yang menerapkan
	Utama Mandala	Madya Mandala	Nista Mandala	
Implementasi dalam pengaturan ruang desa	<i>Kahyangan tiga(pura desa, puseh, dan dalem), pura dadia, pura subak, pangulun carik, catus pata, pempatan agung Mata air, embung, daerah tenget/ angker, jurang (pangkung), bengang, dll.</i>	Persawahan ( <i>carik</i> ), tegalan ( <i>abian</i> ), kuburan adat ( <i>setra</i> ), sungai, danau, <i>empelan, karangsuwung, karang bengang.</i>	Pemukiman ( <i>karang desa, karang paumahan</i> ), sekolah, pasar, jalan, <i>wantilan, bale banjar, dan alun-alun.</i>	Ketiga desa/ banjar
Implementasi dalam zonasi wilayah desa	<b>Zone Konservasi murni</b> (zone perlindungan): Sebagai daerah konservasi berbagai habitat tanaman dan fauna desa. Wisatawan tidak bisa mengakses area ini.	<b>Zone Pemanfaatan Terbatas</b> (zone transisi/ peralihan): Wisatawan bisa melintasi area ini untuk aktifitas ekowisata, dengan sejumlah aturan.	<b>Zone pemanfaatan:</b> Area ini digunakan sebagai lokasi sarana akomodasi dan fasilitas lainnya untuk kepentingan wisatawan,	Banjar Dukuh, Sibetan
Implementasi dalam manajemen ekowisata	Manajemen bergaya banjar/ adat	manajemen bergaya pemerintah	manajemen bergaya swasta	Desa Penglipuran
Implementasi dalam model ekowisata Tri Ning Tri	Ekowisata tipe Masyarakat	Ekowisata tipe Pemerintah	Ekowisata tipe Investor	Banjar Dukuh Desa Penglipuran Banjar Taro Kaja

Sumber: Analisis Data Primer (2012)

Jadi dengan pemahaman *tri mandala* dan *tri angga*, masyarakat Dukuh juga menyepakati sistem zonasi wilayah desa sebagai ruang hidup mereka, dengan mengaturnya ke dalam tiga kategori pengelolaan, yaitu wilayah konservasi (*utama*), wilayah pemanfaatan terbatas (*madya*), dan wilayah pemanfaatan (*nista*). Masing-masing zone memiliki aturan-aturannya tersendiri sesuai dengan fungsi dan batasan-batasan yang dimilikinya. Penyeepakatan pengelolaan ruang seperti itu juga telah disahkan dalam peraturan adat berupa *perarem*, sehingga memiliki kekuatan hukum adat tradisional

yang harus diikuti oleh warga Dukuh dan dapat menjadi instrumen 'bernegosiasi' dalam berhadapan dengan pihak luar, baik pihak pemerintah maupun swasta.

Dengan menggunakan medium ekowisata, masyarakat Dukuh mempelajari kembali kekayaan tetumbuhan warisan leluhur mereka dan menjadikannya sebagai bahan belajar, berinteraksi dengan para wisatawan yang datang berkunjung. Pengalaman demikian menjadi sebuah upaya untuk menemukan kembali jati diri kolektif dan meraih kebanggaan sebagai orang desa di Bali. Berbeda dengan apa yang

dialami sebagian besar masyarakat lokal (adat) di berbagai kawasan di belahan dunia lainnya yang tercerabut dari akar budayanya ketika diterpa oleh pengaruh pariwisata, masyarakat Dukuh justru menggunakan ekowisata sebagai alat untuk memperkuat akar budayanya.

Pada intensitas yang kurang lebih sama, sesungguhnya filosofi kearifan lokal *tri mandala* ini juga dimiliki oleh desa Penglipuran dan banjar Taro Kaja (juga oleh desa-desa lainnya di Bali). Perbedaannya adalah bahwa masyarakat banjar Dukuh memiliki kesempatan untuk melakukan revitalisasi terhadap kearifan lokal tersebut melalui proses pemberdayaan pada masa-masa awal dimulainya kegiatan ekowisata di banjar mereka. Melalui proses pembuatan peta wilayah banjar dan *Rencana Tata Ruang Wilayah Desa-nya*, masyarakat banjar Dukuh diajak kembali mengenali potensi desanya, membuat aturan pengelolaannya, dan 'diantarkan kembali' kepada nilai-nilai kearifan lokal yang sebenarnya sejak lama sudah mereka hayati.

Di desa Penglipuran nuansa kearifan lokal dalam mengelola ekowisata tampak dalam pilihan mereka menjadikan *banjar* adat sebagai pranata utama dalam mengurus ekowisata. Walaupun dalam kesehariannya, sejak tahun 2012, *banjar* adat membentuk Badan Pengelola Desa Wisata untuk mengelola pariwisata di desanya. Penggunaan *banjar* adat -bukan banjar dinas-dilandasi oleh pertimbangan bahwa keberadaan banjar sebagai pranata tradisional masih memiliki pengaruh yang kuat, baik ke internal (*krama* adat) maupun eksternal (pemerintah, swasta). Masyarakat Penglipuran juga menerapkan pola manajemen dengan memadukan tiga gaya manajemen, yaitu manajemen banjar, manajemen swasta, dan manajemen pemerintah.

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah; kenapa pola yang terbentuk cenderung berpola 'serba tiga'? Bilahal ini merunut kepada pola pikir dan pola keyakinan masyarakat Bali, maka akan ditemukan kesesuaiannya. Ternyata baik secara individu maupun kolektif masyarakat Bali telah terbiasa

berpikir atau merujuk kepada suatu konsep atau pola yang serba tiga. Masyarakat Bali, misalnya, begitu familiar memahami ajaran-ajaran spirit moralitasnya dalam konsep yang berpilah tiga, yaitu *tri kaya parisudha* (*manacika, wacika, kayika*), *tri kahyangan* (*pura puseh, bale agung, dalem*), *tri murti* (*brahma, wisnu, siwa*), *tri mandala* (*utama, madya, nista*), *tri angga* (*kepala, badan, kaki*), *tri hita karana* (*parahyangan, pawongan, palemahan*), *tri samaya* (*atita, nagata, wartamana*), *tri rna* (*dewa, rsi, pitra*), *tri saksi* (*dewa saksi, manusa saksi, guru saksi*) dan lain-lainnya.

Sesuai dengan sistem kepercayaan yang dianut, pada tataran empiriknya orang Bali akan membagi dan mengelola ruang hidup di dalam rumah tangganya menjadi tiga bagian, yaitu bagian *utama* terdiri atas bangunan pemujaan, bagian *madya* terdiri atas bangunan rumah tinggal, dan bagian *nista* (*hilir/teben*) yang merupakan ruang untuk membuang dan mengelola sampah, memelihara ternak, dan menjemur cucian.

### **Rwa Bhineda dalam Peduwen Sareng**

Pada filosofi pengaturan ruang lokal *tri mandala*, masyarakat di tiga desa kemudian menerjemahkannya kepada kearifan lokal selanjutnya yang juga sangat operasional, yaitu konsep *rwa bhineda* (*Rwa Bhineda* berarti segala sesuatunya memiliki sisi baik dan sisi buruk, yang dua-duanya bermanfaat dalam menopang sistem kehidupan sosial.), *paduwensareng* (*Paduwen sareng* merupakan konsep hidup, rasa memiliki bersama segala sesuatu yang merupakan kekayaan hidup komunal, baik fisik maupun non-fisik) dan *nempahang rage* (*Nempahang rage* berarti konsep hidup bisa menempatkan diri dalam suatu situasi dan kondisi tertentu). Filosofi *rwa bhineda* membimbing mereka untuk selalu menerima sisi baik dan sisi buruk dari sebuah realitas bahwa apapun unsur-unsur di alam pasti memiliki nilai fungsionalnya karena itu mereka sebagai manusia penganut budaya harus bisa menunjukkan sikap hormat kepada alam. Sehingga dari sini selanjutnya akan muncul sikap memiliki bersama-sama apapun yang diberikan oleh



alam, baik atau buruk (*druwenang sareng*). Oleh karena itu, alam telah memberikan segenap sumber daya ini kepadanya, maka warga masyarakat pun akan memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijak; yakni memanfaatkannya tanpa mengurangi nilai fungsionalitasnya. Kecukupan kebutuhan hidup mereka selalu diukur dengan ambang batas (*carrying capacity*) lingkungan ekologisnya. Tujuannya agar dapat mengetahui ambang batas tersebut, masyarakat harus senantiasa melakukan *positioning* (*nempahang raga*), menyangkut sejauh mana aktivitasnya telah mengusik atau mengganggu keberadaan ruang hidup natural, sosial, dan budaya yang menjadi habitatnya.

Apabila ditarik ke aras yang lebih luas, yaitu aras regional (pulau Bali), penerapan konsep *rwa bhineda* dan *paduwen sareng* tersebut menuntun kepada makna yang kian mendalam, yaitu ketiga tipe ekowisata kendatipun memiliki karakteristik yang berbeda, bahkan bertentangan (misalnya tipe Investor dengan skala besarnya sangat bertentangan dengan tipe Masyarakat dengan pola skala kecilnya), tetapi ketiga tipe ekowisata tersebut tetap dapat hidup dan berkembang pada 'orbit'nya masing-masing di Bali. Artinya, ketiga tipe ekowisata memiliki jalur lintasan perkembangannya masing-masing, sehingga tidak saling meniadakan satu sama lainnya. Masing-masing dapat tumbuh dan berkembang di sebuah pulau kecil yang sama dengan sumber daya alam terbatas dan mendapatkan segmen pasarnya masing-masing (karena karakteristik wisatawan yang 'ditangkap' juga berbeda-beda).

## SIMPULAN

Penelitian yang mendasari tulisan ini menemukan bahwa ekowisata Bali terpilah menjadi tiga tipe, yaitu (1) tipe Investor, (2) Tipe pemerintah, dan (3) tipe Masyarakat. Masing-masing tipe memiliki karakteristik yang berbeda bila ditilik dari aspek produk, pelibatan masyarakat, strategi pengembangan, dan karakter wisatawan.

Masing-masing tipe ekowisata dalam menjalankan usahanya, senantiasa melakukan *positioning*, melihat kembali titik berpijaknya agar tidak bersinggungan dengan lahan pihak lain. Setiap tipe mempunyai posisi, pilihan dan perannya masing-masing, yang apabila hal tersebut diingkari akan berakibat kontraproduktif, bahkan menjadi bumerang bagi keberlanjutannya. Dua konsepsi dan praktik empirik sikap inilah yang membuat setiap tipe ekowisata yang ada di Bali mampu tumbuh bersama, saling menghidupi satu sama lain, dan tidak terjebak kepada pertarungan tidak sehat yang saling menegasikan. Bahwa pada satu atau dua situasi terjadi persaingan-persaingan di antara ketiga tipe tentu hal itu sesuatu yang lumrah dalam dunia bisnis. Akan tetapi, secara empirik, ketiganya sampai hari ini tetap eksis dan berkembang di Bali.

Kondisi ini menggambarkan bahwa ketiga tipe ekowisata yang ada di Bali dapat hidup bersama walaupun memiliki karakter yang berbeda-beda (*rwa bhineda*). Konsep *rwa bhineda* baik dan buruk sebagai dua buah sisi kenyataan diterima dalam bingkai keharmonisan. Demikian pulalah dalam realitas empirik perkembangan ketiga tipe ekowisata, yang masing-masing di dalamnya mengandung kualitas baik dan kualitas buruk dalam rentang skala yang sangat beragam, tetapi kesemuanya itu dapat hidup dalam lintasan 'orbit'nya masing-masing.

Hasil penelitian ini meneguhkan sebuah formulasi ekowisata Bali yang *tri ning tri* dan bergerak dalam suatu pola sikap kolektif *rwa bhineda* dan *peduwen sareng*. Ekowisata *tri ning tri* haruslah dikelola sebagai sebuah ekospiritual, yaitu ekowisata yang tidak hanya bertujuan untuk mengkonservasi lingkungan fisik, tetapi jauh melampaui itu, ia juga harus dapat menghargai kultur lokal dalam memandang lingkungan non-fisikal, termasuk lingkungan spiritual, sehingga bisa memberikan pandangan baru bagi ekowisatawan dan masyarakat lokal setelah mengikuti aktivitas ekowisata. Pandangan bahwa berwisata bukan lagi hanya sekedar proses pemenuhan hasrat untuk